

Implementasi Program Jakarta Entrepreneur pada Perempuan Kepala Keluarga Pelaku UMKM di Kecamatan Cilincing

Aqila Zahira Zenta, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: aqilazenta@student.uns.ac.id

Abstrak

Perempuan kepala keluarga pelaku UMKM merupakan kelompok rentan yang menghadapi beban peran ganda, keterbatasan akses ekonomi, dan tekanan sosial budaya. Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi tertinggi perempuan kepala keluarga yang terdaftar dalam Program Jakarta Entrepreneur se-DKI Jakarta, yaitu 1.058 peserta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi Program Jakarta Entrepreneur serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya pada perempuan kepala keluarga pelaku UMKM di Kecamatan Cilincing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap 14 informan (delapan pendamping dan enam peserta perempuan kepala keluarga) serta dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi Jones (1997) dan Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program berjalan melalui tiga tahapan Jones: pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Pada tahap pengorganisasian, program dilaksanakan oleh enam SKPD dengan mekanisme P1-P7 yang fleksibel dan sistem monitoring berjenjang yang berfungsi baik, namun terdapat ketimpangan jumlah pendamping antarSKPD yang signifikan dan dampak efisiensi anggaran 2026. Pada tahap interpretasi, pemahaman tujuan konsisten di kalangan pendamping, namun akses peserta masih didominasi jaringan sosial informal. Pada tahap aplikasi, program memberikan manfaat nyata berupa peningkatan legalitas produk, literasi keuangan, dan pendapatan, namun belum mengakomodasi beban peran ganda perempuan kepala keluarga dalam desain pelaksanaannya. Faktor pendukung utama meliputi kejelasan tujuan program, kompetensi pendamping yang terstandar, disposisi pelaksana yang kuat, dan antusiasme masyarakat. Faktor penghambat utama adalah ketimpangan sumber daya antarSKPD, miskomunikasi distribusi kuota, norma gender yang membatasi akses permodalan, dan tekanan ekonomi makro 2026.

Kata Kunci: implementasi program; Jakarta Entrepreneur; pemberdayaan perempuan; perempuan kepala keluarga; UMKM

Abstract

Female heads of households who are MSME practitioners represent a vulnerable group facing dual role burdens, limited access to economic resources, and socio-cultural pressures. Cilincing District, North Jakarta, records the highest concentration of female heads of households registered in the Jakarta Entrepreneur Program across DKI Jakarta, with 1,058 participants. This study aims to describe the implementation process of the Jakarta Entrepreneur Program and to identify the factors that support and hinder its implementation among female heads of households as MSME practitioners in Cilincing District. This research employs a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews with 15 informants (nine program facilitators and six female head of household participants) and documentation. Data analysis applies the implementation models of Jones (1997) and Van Meter and Van Horn (1975). The findings reveal that program implementation proceeds through three stages: organizing, interpretation, and application. In the organizing stage, the program is carried out by six regional

agencies with a flexible P1-P7 mechanism and well-functioning hierarchical monitoring; however, significant disparities in the number of facilitators across agencies and the impact of the 2026 budget efficiency policy were identified. In the interpretation stage, facilitators demonstrate consistent understanding of program objectives, although participant access remains predominantly mediated by informal social networks. In the application stage, the program delivers tangible benefits including improved product legality, financial literacy, and income; however, implementation does not yet accommodate the dual role burden of female heads of households. Key supporting factors include clear program objectives, standardized facilitator competence, strong implementer disposition, and community enthusiasm. Key inhibiting factors include resource disparities across agencies, cross-agency quota miscommunication, gender norms limiting access to capital, and macroeconomic pressures in 2026.

Keywords: *program implementation; Jakarta Entrepreneur; women empowerment; female heads of households; MSMEs*

Pendahuluan

Perempuan kepala keluarga merupakan kelompok rentan yang memikul tanggung jawab ekonomi dan sosial secara simultan. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), kepala rumah tangga adalah anggota yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Perempuan menjadi kepala keluarga umumnya bukan karena pilihan, melainkan akibat kondisi seperti perceraian, kematian suami, suami tidak bekerja, atau ditinggalkan tanpa kepastian (Kurniawati, 2022). Kerentanan ini diperparah oleh budaya patriarki yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan layak, dan pelatihan (Awalya & Lindawati, 2023).

Di sektor UMKM, perempuan memainkan peran signifikan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2023) menyebutkan bahwa 64 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons kondisi ini dengan membentuk Program Jakarta Entrepreneur melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 sebagai Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, perizinan, dan akses permodalan kepada pelaku UMKM melalui enam SKPD pengampu.

Data Dinas PPKUKM (2025) menunjukkan Kecamatan Cilincing sebagai kecamatan dengan jumlah peserta Jakarta Entrepreneur tertinggi di DKI Jakarta (14.657 peserta), sekaligus wilayah dengan konsentrasi tertinggi perempuan kepala keluarga yang terdaftar sebagai peserta, yaitu 1.058 orang. Meskipun keterlibatan perempuan tinggi, perempuan kepala keluarga menghadapi beban peran ganda yang tidak selalu diakomodasi dalam desain program. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian bertujuan: (1) mendeskripsikan proses implementasi Program Jakarta Entrepreneur pada perempuan kepala keluarga pelaku UMKM di Kecamatan Cilincing; dan (2) mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

Penelitian terdahulu oleh Permata et al. (2023) dan Subasman et al. (2023) menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM berbasis pemerintah mampu meningkatkan

kapasitas ekonomi peserta, namun penelitian tersebut belum spesifik mengkaji implementasinya pada perempuan kepala keluarga. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan model implementasi Jones (1997) untuk menganalisis proses dan model Van Meter dan Van Horn (1975) untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menghasilkan deskripsi mendalam tentang implementasi Program Jakarta Entrepreneur pada perempuan kepala keluarga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih secara *purposive*, terdiri atas sembilan pendamping program dari enam SKPD pengampu (PPKUKM, PPAPP, KPKP, TKTE, Dinsos, dan Parekraf) dan enam peserta perempuan kepala keluarga pelaku UMKM. Selain wawancara, data diperoleh melalui dokumentasi berupa data program, peraturan daerah, dan dokumen pendukung.

Analisis data mengacu pada model analisis kualitatif interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari pendamping dan peserta program. Analisis substantif menggunakan dua kerangka teori: model Jones (1997, dalam Widodo, 2008) untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait proses implementasi (pengorganisasian, interpretasi, aplikasi), dan model Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Winarno, 2014) untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait enam variabel faktor implementasi.

Hasil dan Pembahasan

Proses Implementasi: Model Jones

Pada tahap pengorganisasian, Program Jakarta Entrepreneur dilaksanakan secara lintas sektor oleh enam SKPD pengampu dengan PPKUKM sebagai leading sector dan sembilan pendamping yang bertugas di Kecamatan Cilincing. Mekanisme P1-P7 mencakup tujuh tahapan dari pendaftaran hingga permodalan, dan bersifat fleksibel sehingga peserta dapat langsung mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa mengikuti urutan wajib. Sistem monitoring dan evaluasi berjenjang dari Rakorcam hingga Biro Kesos Balai Kota berjalan terstruktur, didukung kolaborasi eksternal dengan PT Bogasari, Bank DKI, Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Smesco.

Namun, terdapat ketimpangan jumlah pendamping yang signifikan antarSKPD. PPKUKM memiliki enam pendamping untuk 8.153 binaan, sementara PPAPP hanya satu pendamping untuk 553 binaan di tujuh kelurahan, dan Dinas Sosial hanya dua pendamping untuk enam kecamatan se-Jakarta Utara. Kondisi ini berdampak langsung pada intensitas pendampingan bagi perempuan kepala keluarga, terutama yang terdaftar di PPAPP dan Dinas Sosial. Kebijakan efisiensi anggaran 2026 memperparah kondisi ini

dengan memangkas frekuensi pelatihan dari lima kali menjadi satu kali per tahun, menghapus uang saku peserta, dan mengalihkan pelatihan ke format daring.

Pada tahap interpretasi, pemahaman para pendamping terhadap tujuan program terbukti konsisten, mencakup tiga target: wirausaha naik kelas, wirausaha baru, dan pencari kerja. Interpretasi operasional bervariasi sesuai tupoksi SKPD: PPAPP mengaitkan program dengan ketahanan keluarga, Dinas Sosial menargetkan kelompok rentan, dan Parekraf berfokus pada ekonomi kreatif. Pendamping PPAPP menjelaskan: "Jadi memang sudah tepat ya sasarannya... itu adalah yang kita utamakan adalah perempuan, karena memang di sini ada seperti bagaimana kalau dikaitkan gitu ya program Jakarta Entrepreneur itu dikaitkan dengan ketahanan keluarga" (H, wawancara 8 April 2026). Temuan penting adalah seluruh perempuan kepala keluarga dalam penelitian ini mengetahui program melalui jaringan sosial informal, bukan sosialisasi formal, mengindikasikan jangkauan sosialisasi formal masih belum optimal bagi kelompok sasaran paling rentan.

Pada tahap aplikasi, program memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung peserta. I (Dapoer Teh Ina) menyatakan: "Ada, ada banget perubahannya. Waktu saya itu kan kita belum tahu packaging-nya gimana, terus halal kita belum punya kalau sekarang kita udah punya halal, packaging kita udah rapi" (wawancara 17 April 2026). SU melaporkan peningkatan pendapatan dari 20 persen menjadi 50 persen setelah bergabung program. Namun, pelaksanaan program menghadapi hambatan struktural-gender yang tidak diakomodasi dalam desain formal. Beban peran ganda menjadi hambatan konsistensi partisipasi, sementara proaktivitas peserta menjadi syarat tidak tertulis yang merugikan perempuan kepala keluarga paling rentan, karena mereka justru kelompok yang paling sulit bersikap proaktif.

Faktor Pendukung dan Penghambat: Model Van Meter dan Van Horn

Dari sisi variabel standar dan tujuan kebijakan, tujuan program dipahami secara konsisten dan dinilai relevan dengan kondisi UMKM Cilincing yang didominasi usaha konvensional berskala kecil. Program bersifat inklusif tanpa membatasi akses berdasarkan latar belakang peserta. Namun, standar pelatihan yang seragam belum mengakomodasi keragaman tingkat perkembangan usaha, sehingga peserta yang lebih maju merasa terhambat oleh materi yang tidak relevan.

Pada variabel sumber daya, terdapat ketimpangan signifikan antarSKPD. PPKUKM menyediakan empat jenis alat usaha per peserta pasca pelatihan, TKTE memiliki gedung pelatihan mandiri, dan KPKP memberikan alat pertanian/perikanan. Sebaliknya, PPAPP tidak memberikan bantuan fisik maupun fasilitas bazar, karena seluruh fokus diarahkan pada penguatan mental wirausaha. Manfaat yang diterima peserta sangat bergantung pada SKPD binaan, bukan kebutuhan aktual peserta. SU (peserta PPAPP selama empat tahun) mengungkapkan: "Alat-alat masak gitu bantuan belum pernah, saya udah 4 tahun selama ini belum pernah" (wawancara 20 April 2026).

Pada variabel komunikasi antarorganisasi, komunikasi formal berjenjang berfungsi efektif untuk koordinasi rutin melalui WhatsApp grup 44 pendamping dan Google Form pelaporan harian. Namun, ditemukan miskomunikasi berulang pada level distribusi kuota lintas SKPD. Pendamping PPAPP menjelaskan: "Kuota misalkan Cilincing nih contohnya nih, Cilincing kita kuotanya itu dua puluh lima orang. Nah dua puluh lima orang itu ternyata kita dari PPAPP itu kita enggak mendapatkan kuota" (H, wawancara 8 April 2026). Kualitas komunikasi kepada peserta juga bervariasi: sebagian pendamping sangat responsif, sementara sebagian lain memberikan pemberitahuan mendadak H-1 bahkan untuk kegiatan besar.

Pada variabel karakteristik badan pelaksana, seluruh pendamping memenuhi standar kompetensi yang terukur (S1 dan sertifikasi BNSP yang diperbarui setiap tiga tahun, serta TOT rutin). Para pendamping juga tidak bersifat ego-sektoral dan secara konsisten menunjukkan inisiatif melampaui tupoksi formal, seperti penyusunan buku Roadmap UMKM Naik Kelas secara mandiri dan pendekatan *door-to-door* pada 2019. Hambatan strukturalnya adalah posisi pendamping di luar hierarki kecamatan yang membatasi fleksibilitas koordinatif dan membuat kualitas implementasi bergantung pada individu, bukan sistem kelembagaan.

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, kondisi ekonomi menengah ke bawah Kecamatan Cilincing justru menjadi faktor pendukung karena menciptakan antusiasme partisipasi. Namun, norma patriarki membatasi akses KUR perempuan kepala keluarga. Pendamping PPAPP menggambarkan: "Nah terkadang permodalan itu ketika sudah diproses... nah itu karena budaya setempat, itu tidak diizinkan oleh kepala keluarganya" (H, wawancara 8 April 2026). Kontraksi ekonomi makro 2026 menekan daya beli dan menyebabkan penundaan pembayaran e-order hingga hampir empat bulan. Di sisi lain, perempuan kepala keluarga menunjukkan resiliensi signifikan melalui strategi manajemen waktu terencana.

Pada variabel disposisi pelaksana, seluruh pendamping memiliki komitmen yang kuat dan berorientasi substantif. H (PPAPP) berkomitmen pada peningkatan pendapatan keluarga, HO (TKTE) pada pengentasan kemiskinan, dan A (PPKUKM) pada kemandirian peserta. SR mengakui: "Mereka nge-push tapi akunya yang agak lambat... tapi mereka yang nge-push-nya bagus untuk aku" (wawancara 17 April 2026). Namun, penumpukan beban kerja akibat pengurangan jumlah pendamping menggerus kemampuan mewujudkan komitmen secara merata. Pendampingan bergeser dari proaktif menjadi reaktif, kondisi yang paling merugikan perempuan kepala keluarga dengan beban terberat.

Penutup

Proses implementasi Program Jakarta Entrepreneur di Kecamatan Cilincing berlangsung melalui tiga tahapan Jones. Pada pengorganisasian, program berjalan melalui enam SKPD dengan mekanisme P1-P7 fleksibel dan monev berjenjang yang terstruktur, namun

terhambat oleh ketimpangan pendamping antarSKPD dan dampak efisiensi anggaran 2026. Pada interpretasi, pemahaman tujuan konsisten di kalangan pendamping, tetapi jangkauan sosialisasi formal belum optimal. Pada aplikasi, program memberikan manfaat nyata berupa legalitas produk, literasi keuangan, dan peningkatan pendapatan, namun belum mengakomodasi hambatan struktural-gender perempuan kepala keluarga.

Faktor pendukung utama implementasi meliputi kejelasan tujuan program, kompetensi pendamping yang terstandar (S1 + BNSP + TOT), disposisi pelaksana yang kuat dan berorientasi pemberdayaan substantif, serta kondisi ekonomi lokal yang mendorong antusiasme partisipasi. Faktor penghambat utama adalah ketimpangan sumber daya antarSKPD yang diperparah efisiensi 2026, miskomunikasi distribusi kuota lintas instansi, norma gender yang membatasi akses permodalan perempuan kepala keluarga, dan kontraksi ekonomi makro 2026.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan mekanisme distribusi kuota yang transparan dan merata ke seluruh SKPD, meninjau kembali dampak efisiensi anggaran terhadap program yang menysasar kelompok rentan, mengembangkan pelatihan berjenjang sesuai tingkat perkembangan usaha, dan mengintegrasikan perspektif gender secara eksplisit dalam desain pelaksanaan program.

Referensi

- Awalya, R. S., & Lindawati, Y. I. (2023). Peran Ganda Perempuan Bekerja di Desa Cijaku Provinsi Banten. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 274-281.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. (2025). *Data Internal Peserta Program Jakpreneur Tahun 2019-2025*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Pentingnya Kewirausahaan Perempuan dan Pemuda untuk Capai Indonesia Maju 2045*. Jakarta.
- Kurniawati, D. K. (2022). Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(2), 77-89.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Permata, D., et al. (2023). Pemberdayaan Ekonomi melalui Jakpreneur dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Jakarta. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 26-30.
- Subasman, I., et al. (2023). Transformasi Sosial Perempuan Kepala Keluarga melalui Program PEKKA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.